

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pembangunan dapat diartikan sebagai implikasi dari sebuah gagasan tentang perubahan sosial. Sehingga mengarahkan aktivitas pemerintah dalam bentuk pembuatan kebijakan mendukung pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi. Kata pembangunan secara ensiklopedik, telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstuction*), modernisasi (*moderenization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*soscial change*), pembebasan (*liberation*), pembangunan nasional (*national development*), pengembangan (*progress developing*), dan pembinaan (*constucktion*).¹

Menurut Siagian yang dikutip oleh Harjanto dalam buku teori pembangunan memberikan batasan pengertian tentang pembangunan, yaitu :

*“Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (nation bulding).”*²

Konsepsi perubahan tersebut mempengaruhi aspek kehidupan, termasuk perubahan yang tidak dapat dihindarkan dalam berbagai tatanan pemerintahan dan pembangunan. Dapat dipahami, kalau substansi pembangunan pada dasarnya adalah proses perubahan bersifat multidimensi. Seperti, perubahan ekonomi dan sosial. Perubahan ini, menuju kondisi yang semakin mewujudkan hubungan yang serasi antara

¹ Imam harjanto, *teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press), April 2011. Hal 4

²Siagian yang dikutip oleh Imam Harjanto dalam buku *teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press), April 2011. hal 5

kebutuhan (*need*) dan sumber daya (*resources*).³ Melalui pengembangan infrastruktur masyarakat maka kebutuhan semakin terpenuhi dalam proses pembangunannya. Dengan sendirinya pembangunan merupakan kunci dari proses dan usaha dalam rangka menuju peradaban masyarakat yang lebih maju dan berkualitas modern. Jika memang demikian, konsepsi pembangunan ini menjadi landasan perubahan secara ekonomis maupun sosialnya. Maka dengan sendirinya menstimulus keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (kebijakan).

Dalam rangka menunjang terlaksananya perubahan secara ekonomis maupun sosialnya, tidak terlepas dari pembangunan infrastruktur. Sebab investasi infrastruktur yang rendah juga menjadi penyebab merosotnya daya saing, dan daya tarik investasi Indonesia dengan negara lain secara global. Pembangunan infrastruktur, mempunyai peran signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, serta mengurangi kemiskinan maupun kesehatan. Untuk itu, tantangan pembangunan infrastruktur ke depan adalah mengedepankan peningkatan investasi, dalam rangka pembangunan infrastruktur yang berkualitas global. Pelaksanaan konsepsi pembangunan infrastruktur bandara dikulonprogo bersamaan dengan rencana percepatan dan perluasan pembangunan Indonesia (Masterplan). Atau dengan sebutan LP3E. LP3E adalah sebuah pola induk perencanaan dari pemerintah untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi serta pemerataan kemakmuran masyarakat.⁴ Sehingga dalam konteks ini juga, proyek pembangunan bandara internasional oleh PT.Angkasa Pura 1 merupakan sebuah infrastruktur udara yang dicanangkan dari program masterplan itu sendiri.

³Imam Harjanto, *teori pembangunan*. Universitas Brawijaya Press (UB Press), April 2011. Hal 4

⁴<http://kulonprogoairport.com>.

PT. Angkasa pura 1 (persero) adalah sebuah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT. Angkasa Pura 1 ini, memberikan pelayanan lalulintas udara dan bisnis bandar udara di indonesia yang menitik beratkan pada pelayanan kawasan indonesia bagian tengah dan kawasan indonesia bagian timur. Dalam hal jumlah penumpang, desain bandara ini dapat menampung 50 juta penumpang setiap tahun. Sebab bandara Adisucipto melayani 3,5 juta penumpang per tahun sedangkan kapasitas bandara hanya 1,5 penumpang.⁵ Calon bandara Internasional Kulonprogo ini, sebenarnya sebagai pengganti Bandara Adi Sucipto di Yogyakarta. Selanjutnya, di targetkan akan *grounbreaking* pada Mei 2015. PT Angkasa Pura I (AP I) akan membangun bandara baru di Kulonprogo (DIY) diperkirakan membutuhkan biaya 7,5 triliun. luas bandara diperkirakan 110.000 meter persegi dengan terminal seluas 106.500 meter.⁶ Pembangunan bandara ini akan dikerjasamakan / *joint venture* dengan investor GVK.

GVK adalah perusahaan asal India yang sukses mengelola Bandara Mumbai dan Bangalore. Kerjasama antara keduanya, telah menandatangani nota kesepahaman (*memorandum of understanding / MOU*) dengan GVK dilakukan sejak 2011 di New Delhi India.⁷ Pembangunan bandara diloksaikan di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo telah memasuki tahap pembebasan lahan dan telah disiapkan dana Rp 900 miliar untuk itu.⁸ Proses tersebut akan rampung pada April 2015, kemudian pada Mei pemasangan tiang pancang (*groundbreaking*) dimulai. Saat ini, sedang dilakukan pendekatan ke masyarakat temon terkait pembebasan lahan. Sebab dari 6.802 hektare

Ditemukan pada :

⁵<http://www.bumn.go.id/angkasapura1>

⁶*Ibid.*

⁷*Ibid.*

⁸<http://www.bumn.go.id/angkasapura1/2253/AP.I>

yang dibutuhkan untuk membangun bandara tersebut sekitar 6.270.268 = (± 627 Ha). Masih ada tanah masyarakat yang ditempati 472 Kepala Keluarga.⁹

Program pembangunan bandara diprakarsai oleh PT Angkasa Pura I (AP I), sudah mendapatkan rekomendasi kesesuaian tata ruang kepada Gubernur DIY dan Bupati Kulon Progo. Hal ini, juga didukung oleh surat rekomendasi dari Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan tentang tata ruang dan wilayah (RT RW).¹⁰ Oleh karena itu, bandara pengganti Bandara Adisutjipto semakin memperjelas bahwa bandara baru ini akan segera dibangun dengan mengambil lokasi dipesisir selatan Kecamatan Temon Kulon Progo. Mempertegas kepastian pembangunannya, hal inipun diperkuat oleh pernyataan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat DIY (Astungkoro). Bahwa tahapan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.38 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi.¹¹

Pembangunan bandara Internasional Kulonprogo dapat mempercepat relasi perluasan pembangunan ekonomi dan sosial. Relasi perluasan pembangunan bertujuan memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Khususnya, kualitas kesejahteraan masyarakat petani kecamatan Temon. Rencana percepatan pembangunan oleh pemerintah mendukung terjadinya perubahan dari sirkulasi kehidupan yang lamban menjadi cepat moderen dan maju. Jika ditinjau dari segi efektifitas pembangunan, dapat dikatakan efektif dalam aspek mempercepat pemerataan kebutuhan. Aspek percepatan pemerataan kebutuhan ini, kemudian menjadi informasi pengetahuan dalam melihat aspek lain yang lebih mendasar bagi masyarakat tentang

⁹ <http://www.bumn.go.id>

¹⁰ <http://sp.beritasatu.com/home/bandara-baru-yogyakarta>

¹¹ <http://regional.kompasiana.com>

konsep bagaimana mereka harus bertahan hidup. Harapan keberlangsungan hidup tercermin dalam ketergantungan eksistensinya dengan Sumber Daya Alam (SDA) serta kepemilikan alat produksi seperti tanah. Dalam satu daerah, halnya di kecamatan Temon jelasnya perubahan sosial terjamin tidak hanya dinilai dari segi pembangunan infrastruktur melainkan faktor lain seperti dukungan keahlian (*skill*) dan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimilikinya. Orentasi pada kegunaan sumber daya yang mereka miliki membangun harapan akan keberlangsungan hidup. Jika kemudian, Sumber Daya Alam (SDA) ini dialihfungsikan untuk membangun bandara maka kemungkinan menimbulkan tindakan perlawanan (protes) dari masyarakat. Tindakan perlawanan ini biasanya dari kelompok masyarakat tradisional. Kelompok masyarakat, secara prinsip hidup tidak terlalu mengutamakan pembangunan. Seperti, masyarakat petani yang menguasai hak milik tanah.

Kecamatan Temon Kulon Progo adalah daerah yang memiliki potensi untuk menjadi gerbang Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) disebelah barat. Dataran tanah yang luas, strategis untuk mengembangkan sebuah fasilitas publik ataupun cukup baik untuk areal transportasi udara. Dari hasil studi kelayakan, Kecamatan Temon Kulon Progo lokasi paling bagus untuk pembangunan bandara baik dari aspek tanah, operasional, maupun keamanan.¹² Dalam sudut pandang kegunaan tanah, tanah masyarakat dapat digunakan sebagai lahan pertanian dan sebagai lokasi pemukiman atau tempat tinggal mereka.¹³ Tanah yang ditepati ini memang sebagian besar merupakan milik *Paku Alaman Ground* (PAG). Sedangkan sebagian tanah lain, digunakan untuk pemukiman

¹²<http://wikipedia.com>

¹³<http://regional.kompasiana.com>

penduduk dan lahan pertanian. Sementara sifat tanah sebagai hak milik bersertifikat resmi.¹⁴

Status kepemilikan tanah DIY terbagi dalam kategori diantaranya adalah, Sultan Ground (SG) dimiliki oleh Hamengku Buwono, maupun Pakualaman. Tanah Hak Milik (HM) sebagai harta yang diwariskan atau hibah. Sebagian tanah baik Sultan Ground maupun Pakualaman Ground, sudah diberikan ijinnya oleh Keraton dan Pakualaman untuk menjadi hak milik masyarakat secara turun-temurun Pada tahun 1954 dan ijin itu diubah menjadi bentuk hak milik.¹⁵Dualisme kepemilikan tanah, terlaksana bersamaan dengan disahkannya Undang-undang No.13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY sebagai landasan hukum atas kepemilikan dan penguasaan tanah. Keabsahan atas kepemilikan tanah dijelaskan dalam Undang-undang No.13 tahun 2012 pasal 32 ayat 2, 3,4 dan kegunaan pengelolaan atas tanah di jelaskan pada ayat 5. Sebagaimana penjelasan dari Undang- undang No.13 tahun 2012 pasal 32 ayat 2, 3,4 dan 5 tentang pertanahan ialah sebagai berikut :

“Kasultanan sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kasultanan (ayat 2), Kadipaten sebagai badan hukum merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanah Kadipaten (ayat 3), Tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang terdapat di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah DIY (ayat 4), dan Kasultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat (ayat 5).”

Selanjutnya pemanfaatan tanah, prosedur pemanfaatannya pasal 33 ayat 4 dan kesesuaian tata ruang tercantum dalam pasal 34 ayat 2. Sebagaimana penjelasan dari pasal ini ialah sebagai berikut :

¹⁴<http://regional.kompasiana.com>

¹⁵<http://www.tempo.co/read/news/2012/07/10> . (Petani-Tuntut-Miliki-Tanah-Sengketa-Keraton-Yogya)

“Pengelolaan dan pemanfaatan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten oleh pihak lain harus mendapatkan izin persetujuan Kasultanan untuk tanah Kasultanan dan izin persetujuan Kadipaten untuk tanah Kadipaten (pasal 33 ayat 4), Dalam pelaksanaan kewenangan Kasultanan dan Kadipaten menetapkan kerangka umum kebijakan tata ruang tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten sesuai dengan Keistimewaan DIY (pasal 34 ayat 2).”

Bagaimana implikasi yang bakal terjadi apabila Undang-undang tentang Keistimewaan DIY diberlakukan terhadap status tanah dan hubungan hukum antara warga masyarakat DIY sebagai subyek hak atas tanah dengan tanah sebagai obyek. Selanjutnya, bagaimana nasib masyarakat (Temon) yang menggunakan tanah dengan status Sultan Ground (SG) yang dipakai untuk usaha ekonomi produktif dan tanah-tanah yang digunakan untuk tempat tinggal dengan sistem margrasi. Keabsahan, kepemilikan hak atas tanah oleh masyarakat (tersertifikat) terhadap relevansi Undang-undang keistimewaan DIY menumbuhkan dualisme kepemilikan tanah mempunyai potensi yang rentan dengan konflik.¹⁶ Dualisme kepemilikan ini juga menjadi pemicu adanya tindakan perlawanan.

Permasalahan substansial adalah mengenai gerakan protes yang dilakukan masyarakat temon. Kelompok masyarakat petani, buruh tani dipastikan kehilangan lahan pertanian dan pemukimannya. Alihfungsi lahan menjadi areal transportasi udara tidak menutup kemungkinan direlokasikannya warga terdampak. Kelompok masyarakat yang akan direlokasi adalah 475 Kepala Keluarga (KK).¹⁷ Jelasnya, bahwa keputusan pengambilalihan lahan dan warga terkena dampak akan direlokasikan menyimpan kesenjangan maka tindakan perlawanan (protes) jelas terjadi. Pada dasarnya setiap manusia mempertahankan apa saja yang selama ini dimilikinya dan mempertahankan dari usaha orang lain untuk merebut suber tersebut. Sember tersebut bukan hanya kehormatan diri tapi juga mempertahankan wilaya daerah tempat dia hidup.

¹⁶ <http://regional.kompasina.com>

¹⁷ *Sumber*, data konsultasi publik Angkasa Pura Airpots. Tahun 2014.

Dari sekian kecamatan yang ada dibawah naungan DIY terlihat hanya Kecamatan Temon yang lebih menonjol dalam tindakan perlawanannya. Perlawanan (Protes) sebagai indikasi untuk memperlihatkan keluhan, keberatan, atau ekspresi penolakan secara lugas. Hal ini, di buktikan dengan berbagai bentuk kegiatan protes yang dilakukan oleh kelompok masyarakat Temon. Indikasi perlawanan dalam bentuk pemogokan atau pendudukan.¹⁸ Tindakan protes ini bisa saja dipicu oleh faktor ketidak puasan batin, kehormatan diri, kebencian atau masalah tanah. Kehendak melawan kebijakan, jugadapat saja timbul dari implikasi penggunaan kekuasaan elit politik. Ketika kekuasaan politik digunakan tidak berlandas pada asas responsibiliti, akuntabilitas, nurani kemanusiaan, dan keadilan sosial, maka pengaruh kekuasaan melahirkan sikap untuk melawan atau mengikutinya. Posisi kekuasaan politik itu dihadapkan pada sikap mempertahankan nilai yang sangat otoritatif, maka justru kekuasaan berdampak pada perlawanan. Bentuk resiko dari intensitas perlawanan adalah kekerasan, teror dan intimidasi. Sehingga, semakin intensnya perlawanan massa maka dampak negatif yang diterima sebagai resiko adalah penghancuran lembaga “*deviasi massa*”.

Kekuasaan nilai, lebih berpengaruh terhadap sikap mempertahankan status quo. Dibalik itu juga, ruang dengar pendapatdipraktekan secara tidak demokratis atau merujuk pada rosponsibilitas pemerintah. Semakin kaku dan serba terisolir justru melegitimasi dan merespon sikap protes. Sehingga pada akhirnya, resiko lebih besar dari “*deviasi massa*” adalah revolusi, kekacauan sosial, separatis (*revivalist movment*). Pada akhirnya jelas, atas berbagai hal tersebut melatarbelakangi peneliti untuk mengangkat judul dengan judul penelitian “**Perotes Masyarakat Terhadap Pembangunan Bandara Oleh PT. Angkasa Pura 1 Tahun 2014.**”

¹⁸<http://adisutjibto-airport.co.id>

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan Uraian dalam latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini antara lain :

- 1) Faktor apa yang menyebabkan masyarakat Kecamatan Temon protes atas pembangunan bandara oleh PT. Angkasa Pura 1 ?
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk protes yang dilakukan oleh masyarakat desa Gelagah dan Palihan Kecamatan Temon ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan Penelitian adalah satu pernyataan tentang informasi (data) apa yang akan digali melalui penelitian guna bagi kepentingan keilmuan atau kepentingan-kepentingan yang bersifat praktis. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan masyarakat di Kecamatan Temon melakukan protes atas pembangunan bandara oleh PT. Angkasa Pura 1.
- 2) Untuk menegetahui bentuk-bentuk protes apa saja yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Temon terhadap pembangunan bandara oleh PT. Angkasa Pura 1.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi keilmuan di bidang sosial dan ilmu politik. Serta, penelitian ini mampu memperkaya khazanah bagi Studi Ilmu Pemerintahan, terutama mengenai hal-hal yang berkaitan dengan protes masyarakat atas kebijakan pembangunan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat praktis untuk peneliti

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan keilmiahannya suatu pengetahuan. Keterampilan ataupun kualitas dalam praktik bagi peneliti. Khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan protes masyarakat Kecamatan Temon terhadap pembangunan.

b. Manfaat praktis untuk lembaga (pemerintah)

- i. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang tindakan perlawanan dalam praktiknya.
- ii. Dapat dijadikan referensi ilmiah bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo Kecamatan Temon. Khususnya, tindakan protes dari kelompok masyarakat terhadap pemerintah dari kebijakan yang diambil.

E. Kerangka Dasar Teori.

Kerangka dasar teori yang dimaksud adalah teori-teori yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian. Agar relevan dengan penelitian dan sebagai titik tolak atau landasan pikir dalam memecahkan masalah. Serta penelitian ini menjadi jelas, sistematis, dan ilmiah.

Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Zamroni dalam buku pengantar pengembangan teori sosial telah memberikan batasan tentang teori, sebagai berikut :

*“ Teori adalah sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang saling kait mengait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atas fenomena yang ada. Dengan menunjukkan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel-variabel yang terkait dalam fenomena, dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut ”.*¹⁹

Untuk memperoleh kesatuan penafsiran terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam isi skripsi, maka penulis akan menyajikan landasan teori yang berhubungan langsung dengan bidang yang akan dikaji. Hal ini, agar peneliti mendapat kesimpulan yang relevan. Kesimpulan yang relevan antara teori dan fakta yang diteliti.

1. Teori Protes.

1.1 Pengertian protes.

Protes merupakan semua peristiwa berkumpulnya orang-orang dengan sumber daya yang sama (secara mandiri), mencakup usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.²⁰ Menurut sejumlah kamus kata protes bisa dianggap sebagai kata kerja yang berarti, pernyataan pendapat secara beramai-ramai.²¹ Dan biasanya, berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan secara lugas.²² Peningkaran terhadap tuntutan yang dibebankan dan menuntut hak dan melakukan klaim untuk menunjukkan bahwa tindakannya tidak dilakukan secara sukarela, menyatakan (suatu hal) secara terbuka

¹⁹Kerlinger yang dikutip oleh Zamroni, *Pengantar Perkembangan Teori Sosial*. Op.cit. hal 1-2

²⁰Charles Tilly dkk . yang dikutip oleh Jhon Lofland . *Protes*. Op.cit.Hal. 6-7

²¹Jhon lofland, *Protes*. Insist Press, Yogyakarta, tahun 2003. Hal 2

²²Ibid. Hal.2

dimuka umum.²³ Atau, melakukan deklarasi penolakan tertulis secara formal seperti bersumpah, berjanji untuk melakukan penolakan secara beramai-ramai.²⁴

Dari kutipan kamus dapat disimpulkan beberapa dimensi protes sebagai berikut :

- 1) Penolakan atau keberatan.
- 2) Atas sesuatu yang bersebrangan.
- 3) Yang sudah tidak dapat ditoleransi.
- 4) Yang ditujukan kepada pribadi atau lembaga yang berkuasa.
- 5) Secara beramai-ramai dan resmi.
- 6) Yang dilakukan secara terbuka.
- 7) Dan didasari oleh rasa ketidakadilan.²⁵

Dengan mengacu kepada teori sosiologi yang sangat beragam, pada dasarnya perbedaan cara pandangnya berketub antara protes sebagai :

1. Fenomena objektif dan sebagai sebutan yang merujuk kepada upaya permintaan tanggung jawab atas tindakan orang lain.²⁶
2. Secara khusus berbicara tentang istilah-istilah protes sama dengan membicarakan sebab-sebab atau niat dari aksi kolektif.²⁷

Unit-unit acuan, dalam fenomena objektif tak jarang konsep protes digunakan untuk merujuk kepada unit-unit organisasi sosial yang agak berbeda.²⁸ Dan unit-unit acuan tersebut selalu berubah-ubah dikalangan pengamat tanpa disadari oleh mereka.²⁹

²³*Ibid.*

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

²⁶Truner dalam Jhon Lofland, *Protes*. Op.cit. Hal. 2

²⁷*Ibid.* Hal. 3

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*

Unit-unit acuan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Yang lebih umum adalah fenomena *human gathering* (sekumpulan orang dalam dalam suatu tempat dan waktu yang sama) sebagai acuan, misalnya kumpulan massa melakukan aksi jalan kaki bersama, pegawai, pagar betis, aksi duduk-duduk, kerusuhan, kalang kabut dan sebagainya.³⁰
- 2) Serangkaian peristiwa protes yang saling berhubungan yang berlangsung selama berbulan-bulan melalui suatu kegiatan kampanye.³¹

Karena sangat beragamnya variasi ruang lingkup aksi, kumpulan, peristiwa dan lain-lain yang dapat disebut sebagai protes maka para analis sepakat melakukan pengelompokan.

Yang paling sederhana adalah perumusan yang dilakukan oleh Lipsky yang diikuti dengan memandang protes sebagai aksi politik.³² Menurut Lipski aksi politik ini ditandai dengan kegiatan yang bersifat tidak umum dan dilakukan oleh kaum lemah.³³ Dalam prakteknya penggunaan istilah protes sebagian besar mengacu pada hal-hal yang berhubungan dengan konferensi pers yang sangat dramatis, penguasaan ruang dengar pendapat, dan *press release* yang berlebihan.³⁴

³⁰Phail dan Wohlstein dalam Jhon Lofland, *Protes*. Op.cit. Hal 3

³¹Garrowdi dalam Jhon Lofland, *Protes*. Op.cit. Hal 3-4

³²Lipski dalam Jhon Lofland, *Protes*. Op.cit Hal 5

³³Ibid hal. 5

³⁴Jhon Lofland, *Protes*. Insist Press, Yogyakarta, tahun 2003. Hal 5

Dari lain sisi yang sangat ekstrim, protes merupakan semua bentuk aksi kekerasan atau non kekerasan akibat keberatan terhadap suatu hal.³⁵ Sejalan dengan Piven dan Cloward dikutip oleh Lofland dalam buku protes menyatakan pemogokan dan kerusuhan dalam analisisnya tentang protes sebagai “*deviasi massa*” yang memicu penghancuran lembaga secara serius.³⁶ Meskipun kedua pemakaian kata protes tersebut di atas dilakukan secara serius oleh para analisis namun keduanya sangat jarang ditemui dilapangan.³⁷ Akan tetapi yang lebih umum adalah usaha memisahkan protes dari makna kekerasan dan merumuskan makna yang sebenarnya dalam kontes politik.³⁸ Misalnya, dalam karia klasiknya James Q Wilson menggunakan kata “*bergaining*”, protes dan kekerasan.³⁹ Dengan mendefinisikan protes sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh pihak tertentu melalui aksi publik/cara yang demonstratif atau aksi perusakan.⁴⁰ Hal ini, sebagai bentuk resiko yang akan diteima jika meneruskan kegiatan tertentu.⁴¹

Oleh kerennanya, protes merupakan perlawanan, kerusuhan, demonstrasi spontan, dan pemogokan, seringkali melenceng dari agenda dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.⁴² Sebagai bagian dari upaya menghilangkan makna kekerasan, penggunaan kata protes tidak hanya sebagai suatu yang bersifat tidak terencana dan episodik akan tetapi juga sebagai aksi yang terencana dan itu mempunyai tujuan tersendiri.⁴³

³⁵*Ibid.*

³⁶Piven dan Cloward dalam Jhon Lofland, *Protes*. Op.cit.

³⁷Lofland, *Protes*. Insist Press, Yogyakarta, tahun 2003. Hal 5

³⁸*Ibid.*

³⁹Wilson dikutip Lofland, *Protes*. Op.cit. Hal 5-6

⁴⁰*Ibid.* 5-6

⁴¹*Ibid.* Hal. 6

⁴²Gushfield dalam Jhon Lofland, *Protes*. Op.cit. Hal 6

⁴³ Lofland, *Protes*. Insist Press, Yogyakarta, tahun 2003. Hal 6

Telaah secara mendalam terhadap studi protes menunjukkan adanya pemakaian kata protes dengan makna yang sama sekali berbeda dengan yang telah dikemukakan.⁴⁴ Meskipun para penulis membicarakan bukti empiris tapi pembahasannya banyak bersimpangan. Dua makna berikut sebagai penjelasan, yaitu :

1) Aksi tanpa kekerasan.

Kebiasaan pertama menggunakan istilah utama berupa “aksi tanpa kekerasan” dan “aksi langsung” dan bukan istilah protes.⁴⁵ Istilah ini lebih banyak dipakai untuk aksi-aksi sosial kemanusiaan dan religius ketimbang bidang sosiologi dan ilmu politik.⁴⁶ Positifnya, aksi tanpa kekerasan dapat berupa protes simbolis (misalkan, prosesi, kumpul-kumpul, pagar betis), penolakan secara ekonomi, sosial, dan politik (pemogokan dan boikot), intervensi (blokade, pendudukan), dan lembaga alternatif (misalnya sistem ekonomi dan transportasi).⁴⁷

2) Aksi kolektif dan kumpulan bertujuan.

Nama lain kedua dari protes adalah “aksi kolektif”, menurut Tilly dkk., yang dikutip oleh Lofland dalam buku protes yaitu sebuah konsep yang didefinisikan sebagai “semua peristiwa berkumpunya orang-orang dengan sumber daya yang sama (secara mandiri), mencakup usaha bersama untuk mencapai tujuan tertentu.⁴⁸ Selanjutnya, Tilly mengemukakan adanya persamaan antara konsep aksi kolektif (kumpulan bertujuan) dan protes, namun menolak pemakaian konsep protes karena kata protes dan pemberontakan,

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶*ibid.*

⁴⁷*Ibid.* Hal. 7

⁴⁸Charles Tilly dalam Jhon Lofland, *Protes*. Op.cit. Hal 7

kekacauan, gangguan menunjukkan adanya niat dan posisi politik si pelaku, biasanya dari sudut pandang penguasa.⁴⁹ Aksi kolektif mencakup pola-pola perilaku sangat luas yang jaringan dan kekuatannya layak diperhitungkan. Tidak hanya perilaku-perilaku yang oleh penguasa disebut sebagai protes, pemberontakan, atau hal-hal sejenisnya akan tetapi juga kegiatan berupa petisi, parade, bloc voting, dan berbagai cara kumpul lainnya yang ditoleransi dan bahkan didukung oleh penguasa.⁵⁰

1.2 Peilaku kolektif dan protes.

Protes sebagai sebuah aksi, kumpulan, peristiwa, atau bentuk perilaku kolektif kemunculannya didorong dan dihambat oleh beragam konteks perilaku kolektif dan munculnya karena disebabkan atau dihalangi oleh bentuk-bentuk perilaku kolektif lainnya.⁵¹

1. Protes sebagai bagian dari perilaku kolektif.

Perilaku kolektif dipandang sebagai suasana kolektif, dorongan/kesadaran emosional dan aksi temporer dalam suatu peristiwa tak lazim dengan sebagai variabel yang memiliki bentuk khas.⁵² Oleh karena itu, protes sebagai bentuk perilaku kolektif memiliki tingkatan yang berbeda-beda.⁵³ Contoh yang menonjol dan dikenal luas adalah mencakup beberagam jenis aksi protes, kumpulan, kampanye.⁵⁴

⁴⁹Ibid

⁵⁰ibid. Hal. 7-8

⁵¹Lofland, *Protes*. Insist Press, Yogyakarta, tahun 2003. Hal. 30

⁵²*Ibid.*

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

Tinjauan terhadap perilaku kolektif sebagai sebuah variabel akan membantu kita menemukan hal penting menarik dari aksi protes.⁵⁵ Dalam bentuk yang paling efektif, aksi protes selalu melekat pada kegiatan-kegiatan yang bersifat rutin, berlangsung dalam situasi perilaku kolektif yang stabil, aman dan penuh ketidakpastian terutama yang mengandung unsur kekerasan.⁵⁶

Menurut Eisenger yang dikutip oleh Lofland dalam buku protes mengatakan bahwa protes secara implisit memiliki potensi ancaman dan merupakan bentuk sederhana dari ancaman kekerasan, yaitu :

“Pembedaan antara hal yang bersifat implisit dan eksplisit itu penting. Protes mengandung dorongan agresif dengan mengendalikan dan membungkamnya, sedangkan kekerasan membebaskan dorongan ini. Protes adalah alat yang digunakan oleh sekelompok orang untuk memanipulasi ketakutan terhadap kekacauan dan kekerasan. Dan pada saat yang sama melindungi dirinya dari resiko yang sangat potensial dari strategi ini.”⁵⁷

2. Situasi perilaku kolektif sebagai konteks protes.

Perilaku kolektif memiliki bentuk atau keadaan dasar (*elementary*).⁵⁸ Perubahan-perubahan penting pada struktur makro dalam lembaga inti berakibat pada peningkatan jumlah dan ragam bentuk dasar perilaku kolektif dan bentuk gelombang atau siklus yang oleh para analis dikelompokkan dalam tiga tajuk makro sosial.⁵⁹ Penamaan ini biasanya digunakan para analis untuk konteks-konteks revolusi buruh tani, pemberontakan, pergolakan, perang saudara, kekacauan, kekacauan sosial, kebangkitan, keresahan, kerusuhan, *genocide*, revolusi, gerakan protes dan gerakan separatis (*revivalist movement*).⁶⁰

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶*Ibid.*

⁵⁷ Eisenger dalam Jhon Lofland. *Protes*. Op.cit. Hal. 31

⁵⁸Jhon Lofland. *Protes*. Penerbit Insist Press. Yogyakarta. Tahun 2003. hal 31

⁵⁹*Ibid.* hal 31

⁶⁰*Ibid.*

1.3 Aksi gerakan dan protes.

Aksi protes dapat dianggap sebagai salah satu dari tiga jenis dasar aksi, yaitu gaya yang oleh sayap kanan didefinisikan sebagai aksi yang sopan, wajar atau diplomatis.⁶¹ Sedangkan, oleh sayap kiri didefinisikan sebagai aksi kekerasan.⁶²

Pada sebagian besar masyarakat *ordinary times*/jaman sekarang, strategi yang paling dominan adalah diplomasi bertahan.⁶³ Ciri-cirinya adalah santun, berwibawa, sopan dan teratur yang menjadi unit utama aksi kolektifnya adalah kelompok kepentingan (*interest group*) yaitu semua organisasi formal yang terlibat dalam kegiatan diplomatik.⁶⁴ Organisasi ini didesain untuk melindungi dan meningkatkan sumber daya sosial anggota yang mempengaruhi kebijakan dan praktek-praktek asosiasi lain (terutama lembaga pemerintah) dan dengan mempengaruhi sentimen dan disposisi publik secara luas.⁶⁵

Menurut Robert Salisbury yang dikutip oleh Lofland dalam buku protes telah memberikan pandangan berguna untuk menyusun kategori utama strategi yang dijumpai dalam kelompok kepentingan, yaitu :

“ Bentuk paling dangkal adalah lobbying yang melibatkan usaha-usaha vulgar untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Tiga variasinya adalah lobi profesional, mobilisasi konstitusi dan interaksi informal antara elit kelompok kepentingan dengan elit target. Dalam sebuah representasi juru bicara kelompok dianggap telah mewakili (kepentingan kelompok) secara terbuka menurut mekanisme lembaga yang menentukan kebijakan klas. Mobilisasi komperhensif dilakukan untuk menyatukan kelompok-kelompok kepentingan dengan organisasi lain misal partai politik, yang bertujuan jangka panjang untuk memonilisasi dukungan masyarakat luas sebagai usaha untuk mengendalikan mekanisme kebijakan pemerintah. Meskipun dalam strategi ini tidak menutup kemungkinan digunakan taktik-taktik ilegal dalam bentuk suap,

⁶¹*Ibid.*

⁶²*Ibid.* Hal. 282

⁶³*Ibid.*

⁶⁴*Ibid.* Hal. 286

⁶⁵*Ibid.*

pemerasan, penyardapan dan pencurian namun semuanya dilakukan secara damai, sopan dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan."⁶⁶

Perjuangan lewat protes selalu dihadapkan pada pilihan anatar perjuangan santun dan perjuangan dengan kekerasan sebagai perjuangan tengah/*middle force*.⁶⁷ Sehingga protes merupakan bentuk perjuangan yang posisinya ditengah yanitu antara yang sopan dan tidak sopan.⁶⁸ Bagian dari bentuk protes adalah demonstrasi, atau aksi untuk membuktikan sesuatu dengan cara-cara nyata dan mencolok dan pengungkapan aspirasi kelompok secara publik.⁶⁹

Jenis-jenis perjuangan melalui protes.

Jika ingin memahai perjuangan dengan protes, pertama-tama kita harus membuat gambaran yang jelas tentang protes sebagai sebuah entitas global yang sangat kompleks dan terdiri dari beragam bentuk.

1. Protes simbolik.

Klas aksi politik yang pertama dan berada pada tingkatan terendah disebut protes simbolik yaitu cara-cara yang teratur, tidak merusak dan kurang begitu aktif yang dilakukan secara kolektif untuk mengemukakan keluhan.⁷⁰ Tiga bentuk utama protes simbolik meliputi prosesi, pertemuan,/*assembly*, dan aksi pagar betis/*picketing*.⁷¹ Disebut simbolik karena pihak berwajib atau masyarakat luas sudah siap dengan berlangsungnya aksi tersebut tanpa penolakan/hambatan.⁷² Jika masyarakat telah menganggap aksi simbolik sebagai satu aksi yang

⁶⁶Robert Salisbury dalam Jhon Lofland. *Protes*. Op.cit .Hal.287

⁶⁷Jhon Lofland. *Protes*. Penerbit Insist Press. Yogyakarta. Tahun 2003.Hal.287

⁶⁸*Ibid*.Hal.287

⁶⁹*Ibid*.

⁷⁰*Ibid*. Hal. 290

⁷¹*Ibid*.

⁷²*Ibid*.

mengancam dan harus dihentikan, maka aksi protes tersebut telah memasuki tahap ketiga yaitu intervensi/*intervetion*.⁷³

2. Anti kerja sama.

Kelas kedua dari aksi protes disebut anti kerjasama/*noncooperation*, yaitu penolakan untuk meneruskan tatanan sosial yang ada, kemudian Yang paling umum terlihat pada realitas ekonomi termasuk diantaranya adalah pemogokan, pengembosan, boikot.⁷⁴

3. Lembaga alternatif.

Kelas ketiga yang merupakan kelas terakhir dari aksi protes menurut Sharp adalah intervensi yang terdiri dari dua bentuk, yaitu intervensi positif dan intervensi negatif.⁷⁵ Intervensi positif sebagai sebuah upaya untuk menciptakan pola-pola, kebijakan, hubungan perilaku atau lembaga baru yang diinginkan.⁷⁶ Jika lembaga alternatif aksi protes menggantikan loyalitas masyarakat, maka aksi telah mencapai jenis protes yang paling serius dan paling penting bahkan membawa perubahan besar bahkan revolusi.⁷⁷

4. Intervensi.

Menurut Sharp yang dikutip oleh Jhon Loflan dalam buku protes menjelaskan bahwa bentuk aksi protes terkuat ketiga disebut *intervensi* yang dapat menghancurkan pola-pola, kebijakan dan hubungan perilaku serta lembaga yang dianggap sebagai penghambat.⁷⁸ Metode intervensi memiliki tantangan yang lebih nyata dan langsung. Aksi ini cenderung

⁷³*Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* Hal. 290-291

⁷⁵ *Ibid.* Hal. 291

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

⁷⁸ Sharp dalam Jhon Lofland. *Protes*. Op.cit. Hal 289-292

melibatkan kekerasan maka dapat dibedakan empat pola intervensi sebagai berikut :

- a) *Harrasment* (pelecehan), dilakukan melalui kegiatan-kegiatan menentang orang yang dimaksud dengan cara-cara yang tidak lazim.
- b) *System overloading*. Karena terlalu banyaknya proses-proses yang diintervensi.
- c) *Blockade*. Pemeroses secara temporer menghambat gerakan orang atau properti dari pihak yang ditentang.⁷⁹
- d) *Occupation* (pendudukan). Pendudukan yang dilakukan dengan memasuki atau menolak meninggalkan tempat-tempat yang tidak diinginkan atau dari tempat yang dilarang.⁸⁰

1. Teori pembangunan.

2.1 Pengertian Pembangunan.

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation bulding*).⁸¹ Secara sederhana pembangunan adalah perubahan yang berguna menuju sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.⁸²

⁷⁹Taylor yang dikutip oleh Jhon Lofland. *Protes*. Op.cit. Hal 292

⁸⁰Sharp. yang dikutip oleh Jhon Lofland. *Protes*. Op.cit. Hal 291-292

⁸¹Siagian yang dikutip oleh Imam Harjanto dalam buku *Teori Pembangunan*. Op.cit. Hal 5

⁸²Rogers yang dikutip oleh Rochajat Harun dan Elviano dalam buku, *Komunikasi Pembangunan Perubahan Sosial*. Op.cit. Hal. 3

Secara umum, kata pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya.⁸³ Seringkali, kemajuan yang dimaksud terutama adalah kemajuan material, maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat di bidang ekonomi.⁸⁴

Kemudian atas nama pembangunan pemerintah juga sering memberengus kritik yang muncul dari masyarakat.⁸⁵ Kritik tersebut dinilai dapat mengganggu stabilitas politik. Stabilitas politik adalah sarana penting untuk memungkinkan pelaksanaan pembangunan.⁸⁶

2.2 Mengukur pembangunan.

1. Kekayaan rata-rata.

Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi.⁸⁷ Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi.⁸⁸ Dengan demikian, yang diukur adalah produktifitas masyarakat atau produktifitas negara tersebut setiap tahunnya. Dalam bahas ekonominya, produktivitas ini diukur oleh *Produk Nasional Bruto* (PNB) atau *Gross National Product* (GNP) dan *Produk Domestik Bruto* (PDB) atau *Gross Domestik Bruto* (GDP).⁸⁹

Karena PNB atau PDB mengukur hasil keseluruhan dari sebuah negara (jumlah penduduknya) berlainan, untuk bisa membandingkan dipakai ukuran

⁸³Arief Budiman. *Teori pembangunan dunia ketiga*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2000. Hal. 1

⁸⁴*Ibid.* Hal. 1

⁸⁵*Ibid.* Hal 2

⁸⁶*Ibid.*

⁸⁷*Ibid.*

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

PNB/kapita atau PDB/kapita.⁹⁰ Dengan, ini dapat dilihat berapa produksi rata-rata setiap orang dari negara bersangkutan.⁹¹

2. Pemerataan.

Sejara menjadi jelas bahwa kekayaan keseluruhan yang dimiliki, atau yang diproduksi oleh sebuah bangsa, tidak berarti bahwa kekayaan itu merata dimiliki oleh semua penduduknya.⁹² Bisa terjadi, sebagian kecil orang didalam negara tersebut memiliki kekayaan yang berlimpah, sedangkan sebagian besar hidup dalam kemiskinan.⁹³

Oleh karena itu, timbul keinginan untuk memusatkan aspek pemerataan dalam ukuran pembangunan, bukan lagi hanya PNB/kapita saja.⁹⁴ Pemerataan ini secara sederhana diukur dengan melihat beberapa prosen dari PNB diraih oleh 40% penduduk termiskin, beberapa prosen oleh 40% penduduk golongan menengah, dan beberapa prosen oleh 20% penduduk terkaya. Jika terjadi ketimpangan yang luar biasa, misalnya 20% penduduk terkaya meraih lebih dari 60 % PNB, sedangkan sisanya dibagi di antara 80% penduduknya, ketimpangan antara orang-orang kaya dan orang miskin dianggap besar.⁹⁵

Dengan demikian dapat dikatakan, bangsa atau negara yang berhasil melakukan pembangunan adalah mereka yang disamping tinggi produktivitasnya, penduduknya juga makmur dan sejahtera secara relatif merata.⁹⁶

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.* Hal.3

⁹²*Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴*Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.* Hal. 3-4

⁹⁶ *Ibid.* 4-5

3. Kerusakan lingkungan.

Sebuah negara yang tinggi produktivitasnya, dan merata pendapatan penduduknya, bisa saja berada dalam sebuah proses untuk menjadi semakin miskin.⁹⁷ Hal ini, karena pembangunan yang menghasilkan produktivitas yang tinggi itu tidak mempedulikan dampak terhadap lingkungannya. Sumber – sumber alamnya semakin terkuras, sementara kecepatan bagi alam untuk melakukan rehabilitasi lebih lambat daripada kecepatan perusakan sumber alam tersebut.⁹⁸

Oleh karena itu, sering terjadi bahwa pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai.⁹⁹ Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan atau tidak *sustainable*.¹⁰⁰ Karena itu, kalam kriteria keberhasilan pembangunan yang paling baru, dimasukan juga faktor kerusakan lingkungan sebagai faktor penentu.¹⁰¹ Apa gunanya, sebuah pembangunan pada saat ini memang tinggi produktifitasnya, merata pembagian kekayaan, tapi dalam jangka waktu sepuluh tahun kempes karena karena kehilangan sumber daya yang menjadi implus utama pertumbuhan tersebut.¹⁰²

4. Keadilan sosial dan kesinambungan.

Tolok ukur pembangunan yang berhasil, yang semulanya hanya memberi tekanan pada tingkat produktivitas ekonomi sebuah negara, kini menjadi semakin kompleks.¹⁰³ Dua faktor baru yang ditambahkan pada pembahasan

⁹⁷Ibid. 6

⁹⁸Ibid.

⁹⁹Ibid.

¹⁰⁰Ibid. 6-7

¹⁰¹Ibid. Hal 7

¹⁰²Ibid.

¹⁰³Ibid.

diatas, yakni faktor keadilan sosial (pemerataan pendapatan dan faktor lingkungan, berfungsi untuk melestarikan pembangunan ini , supaya bisa berlangsung terus secara berkesinambungan.¹⁰⁴

Faktor keadilan sosial dan faktor lingkungan saling berkaitan erat.¹⁰⁵ Keadilan sosial, bukanlah faktor yang dimasukan atas dasar pertimbangan moral, yaitu demi keadilan saja.¹⁰⁶ Bila terjadi kesenjangan yang terlalu mencolok antara orang-orang kaya dan miskin, masyarakat yang bersangkutan semakin rawan secara politis.¹⁰⁷

Orang-orang miskin itu cenderung untuk menolak status quo yang ada.¹⁰⁸ Mereka ingin memperbaiki diri, dengan mengubah keadaan.¹⁰⁹ Oleh karena itu, bila konfigurasi kekuatan-kekuatan sosial memungkinkan (misalnya, terjadi pertentangan antara kaya dan miskin, terjadi perpecahan dikalangan militer dan sebagian dari mereka mendukung kelompok yang mau mengubah keadaan, kelompok orang-orang miskin ini terorganisir secara relatif baik, dan sebagainya), akan terjadi gejolak politik yang bisa menghancurkan hasil pembangunan yang suda dicapai.¹¹⁰

Pembangunan dalam keadaan yang paling baik sesungguhnya berarti penguatan basis material suatu negara, terutama melalui industrialisasi, mengikuti pola yang sangat mirip dari satu negara ke negara lain.¹¹¹ Model yang

¹⁰⁴*Ibid.*

¹⁰⁵*Ibid.*

¹⁰⁶*Ibid.* Hal. 7-8

¹⁰⁷*Ibid.* Hal.8

¹⁰⁸*Ibid.*

¹⁰⁹*Ibid.*

¹¹⁰*Ibid.*

¹¹¹*Ibid*

banyak dipakai ini telah diperkuat oleh kepentingan keamanan elit penguasa.¹¹² Di dalam model tersebut, akibatnya terdapat potensi konflik, pertama-tama antara negara-negara yang bersaing dalam sistem antar negara, dan kedua antara disatu pihak kekuasaan negara dan dilain pihak kelompok-kelompok sub nasional yang menantang legitimasi negara.¹¹³ Proyek pembangunan bangsa adalah unik karena alasan yang sederhana yaitu bahwa proyek itu menggunakan wilayah tertentu dan penduduk tertentu yang tinggal di wilayah tersebut sebagai alat-alat pembangunan. akan tetapi, setiap proyek pembangunan bangsa mengandung elemen-elemen dasar :

- a) Kontrol politik dan militer yang eksklusif atas wilayah tertentu.
- b) Usaha mempertahankan wilayah ini dari kemungkinan klaim dari luar.
- c) Penciptaan kesejahteraan materil dan legitimasi politik di dalam wilayah ini.¹¹⁴

3. Teori konflik.

3.1 Pengertian konflik.

Istilah konflik secara etimologi berasal dari bahasa latin *con* yang berarti bersama dan *fligere* yang berarti benturan atau tabrakan.¹¹⁵ Dari satu sisi “konflik” dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih.¹¹⁶ Di sisi lain, Chang mengemukakan bahwa akar konflik ada pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri

¹¹²*Ibid.*

¹¹³*Ibid.*

¹¹⁴Bjorn Hettne, *Teori Pembangunan dan Tiga Dunia*. Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, tahun 2001. Hal 50-52

¹¹⁵Elly Stiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Penerbit Kencana Prenamedia Group. Jl Tembara Raya No 23 Rawamangun Jakarta 13220. Hal. 54

¹¹⁶ *Ibid.* Hal. 54

hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal.¹¹⁷ Chang mengajukan pendapat lain bahwa selain unsur-unsur diatas, emosi manusia pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.¹¹⁸

Dalam kajian ilmu-ilmu sosial ada dua pendekatan yang saling bertentangan antara satu sama yang lain. Dua pendekatan tersebut adalah : 1) pendekatan struktural-fungsional (konsensus). 2) pendekatan konflik.¹¹⁹

1. Pendekatan Fungsional (Konsensus). Mengasumsikan bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar nilai yang disepakati bersama (konsensus).¹²⁰ Yaitu, bahwa unsur masyarakat tersebut tergantung satu sama yang lain dan saling berhubungan secara fungsional.¹²¹ Pendekatan konsensus ini berasumsi bahwa setiap kelompok dalam masyarakat mempunyai kepentingan yang berbeda, bahkan bertentangan. Masyarakat terintegrasi disebabkan oleh adanya kelompok kepentingan yang dominan, sehingga kelompok yang dominan tersebut mendominasi kepentingan kelompok yang lemah.¹²²

2. Pendekatan konflik.

Istilah konflik dalam sudut pandang ilmu politik acap kali di kaitkan dengan kekerasan. Seperti kerusuhan, pembunuhan, dan terorisme.¹²³ Konflik memang mengandung pengertian “benturan” , persaingan, pertentangan akibat kepentingan yang berbeda. Oleh sebab itu, adakalanya konflik berwujud pada aksi kekerasan terutama dalam masyarakat negara yang belum memiliki

¹¹⁷*Ibid.*

¹¹⁸*Ibid.*

¹¹⁹*Ibid.* Hal. 55-56

¹²⁰ *Ibid.* Hal 56

¹²¹*Ibid.*

¹²²*Ibid.*

¹²³*Ibid.*

mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga.¹²⁴ Dan adakalanya konflik yang berwujud kekerasan seperti perdebatan dalam masyarakat negara yang sudah mempunyai mekanisme penyelesaian konflik yang terlembaga.¹²⁵

Asumsi ini mendasari pernyataan bahwa konflik tidak selalu berimplikasi negatif dalam artian konflik menjadi penyebab perusak integrasi dan kesatuan masyarakat.¹²⁶ Ini menunjukkan bahwa dipihak lain ternyata konflik berimplikasi pada timbulnya integrasi masyarakat dan sebagai sumber perubahan.¹²⁷ Konflik selain dipahami sebagai sumber perubahan, konflik juga berfungsi sebagai penghilang unsur-unsur pengganggu dalam interaksi sosial sebab konflik juga dapat dijadikan sebagai media penyelesaian ketegangan antara unsur sosial politik yang saling bertentangan.¹²⁸

Konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang serba hadir dalam kehidupan.¹²⁹ Pernyataan ini mengindikasikan bahwa tidak semua konflik berimplikasi politik atau beraspek politik.¹³⁰ Oleh sebab itu, penyelesaian konflikpun tidak harus melalui mekanisme politik sebab bisa juga diselesaikan oleh kedua pihak, pihak ketiga melalui proses arbitrase atau mediasi.¹³¹ Artinya, tanpa melibatkan lembaga politik kecuali jika konflik itu tidak dapat diselesaikan maka lembaga (peradilan) dapat menyelesaikannya.¹³²

¹²⁴*Ibid.*

¹²⁵*Ibid.*

¹²⁶*Ibid.*

¹²⁷*Ibid.*

¹²⁸*Ibid.* Hal 56-57

¹²⁹ *Ibid.* Hal. 57

¹³⁰*Ibid.*

¹³¹*Ibid.* Hal. 58

¹³²*Ibid.*

3.2 Struktur konflik.

Menurut Ramalan Surbakti yang dikutip oleh Stiadi dalam buku pengantar sosiologi politik mengatakan bahwa, situasi konflik hakikatnya dapat dibagi dua bentuk. Yaitu, 1) *zero sum conflict* dan 2) *non zero sum conflict*.¹³³

Zero sum conflict sebagai situasi konflik yang bersifat antagonis, tanpa memungkinkan adanya kompromi dan kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat konflik.¹³⁴ Struktur konflik seperti ini adalah tidak mungkin mengadakan kerjasama karena pemenang mendapatkan semuanya sedangkan yang kalah kehilangan semuanya.¹³⁵ Sedangkan *non zero sum conflict* sebagai situasi konflik di mana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin berdialog, kompromi, dan kerjasama.¹³⁶

3.3. Tujuan konflik

Menurut Ramalan Surbakti dikutip oleh Stiadi dalam buku pengantar sosiologi politik membagi tujuan konflik dalam dua bentuk. Yaitu, 1) mendapatkan sumber nilai-nilai otoritatif, dan 2) mempertahankan sumber nilai-nilai otoritatif.¹³⁷

Konflik yang bertujuan untuk mempertahankan sumber-sumber merupakan ciri manusia yang hidup bermasyarakat karena manusia memerlukan sumber nilai-nilai tersebut baik materi maupun spiritual untuk dapat hidup secara layak dan terhormat dalam masyarakat.¹³⁸ Pada dasarnya setiap manusia mempertahankan apa saja yang selama ini dimilikinya dan mempertahankan dari usaha orang lain untuk

¹³³Ramalan Surbakti dikutip oleh Elly Stiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*. Op.cit Hal 63

¹³⁴ Ibid. Hal. 63

¹³⁵ Ibid.

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Ibid. Hal 65

¹³⁸ Ibid.

merebut sumber tersebut.¹³⁹ Sumber tersebut bukan hanya keselamatan diri tapi juga mempertahankan wilayah daerah tempat dia hidup, kekayaan, keluarga, status dan harga dirinya.¹⁴⁰ Sedangkan, tujuan konflik mendapatkan dan mempertahankan hanya perbedaan analisis dan dalam kasus konflik tidak semua bertujuan pada salah satu tujuan.¹⁴¹

3.4 Intensitas konflik

Intensitas konflik dapat diartikan besar kecilnya konflik dalam suatu struktur sosial.¹⁴² Intensitas konflik ini dapat dilihat dari tingkat penggunaan kekerasan dalam konflik itu sendiri.¹⁴³ Semakin intens suatu konflik, maka kemungkinan semakin besar penggunaan kekerasan dalam konflik tersebut.¹⁴⁴ Sebaliknya, semakin kurang intens suatu konflik maka semakin besar penggunaan dialog, musyawarah, dan kompromi dalam konflik tersebut.¹⁴⁵

F. Definisi Konseptual.

Definisi konseptual adalah unsur yang dipakai untuk menggambarkan fenomena-fenomena alami.¹⁴⁶ Definisi ini yang merupakan satu pengertian segala yang menjadi pokok perhatian juga dimaksudkan untuk menjadi batasan tentang istilah yang ada dalam pokok permasalahan. Batas bahasan dalam konseptual dalam penelitian ini adalah :

¹³⁹*Ibid.*

¹⁴⁰*Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.* Hal 65-66

¹⁴² Elly Stiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Penerbit Kencana Prenamedia Group. Jl Tembara Raya No 23 Rawamangun Jakarta 13220. Hal. 67

¹⁴³ *Ibid.* Hal.67

¹⁴⁴*Ibid.*

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶Sofyan Effendi dan Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1986 .

1) Protes.

Protes sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh pihak tertentu melalui aksi publik/cara demonstratif atau aksi perusakan. Dan biasanya, berupa pembangkangan, keluhan, keberatan, atau ungkapan keengganan terhadap suatu gagasan atau tindakan, ekspresi penolakan secara lugas. ¹⁴⁷

2. Pembangunan.

Pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa. Ataupun negara dan pemerintah. menuju moderenitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation bulding*).¹⁴⁸

3. Konflik

Konflik dalam kehidupan sosial berarti merupakan benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Tujuan konflik adalah untuk mempertahankan dan mendapatkan sumber daya yang ada.¹⁴⁹

G. Definisi Operasional.

Definisi Operasional adalah unsur penelitian yang memberitahu bagaimana cara mengukur variabel.¹⁵⁰ Dengan kata lain, definisi operasional adalah petunjuk dan pelaksanaang untuk mengukur suatu variable.

Petunjuk-petunjuk yang merupakan dasar pengukuran variabel-variabel dalam penelitian mengenai protes masyarakat Kecamatan Temon adalah sebagai berikut :

¹⁴⁷ Wilson dalam Jhon lofland, protes. Op.cit. Hal 5-6

¹⁴⁸Siagian dalam Imam harjanto dalam buku *Teori Pembangunan*. Op.cit. Hal 5

¹⁴⁹Elly Stiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Politik*, Op.cit. Hal 54

¹⁵⁰Sofyan Effendi dan Masri Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*, Op.cit. .hal 32

- 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi protes masyarakat terhadap pembangunan bandara oleh PT. Angkasa Pura satu di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo tahun 2014.
 - a. Tolok ukur/indikator : Struktur konflik.
 - *Zero sun konflikt*
 - *Non zero sun konflikt*
 - b. Tolok ukur/ indikator :Tujuan konflik.
 - Mempertahankan nilai
 - Mendapatkan nilai
 - c. Tolok ukur/ indikator : Intensitas konflik
 - menggunakan kekerasan
 - musawara atau berdialog
 - kompromi
 - d. Tolok ukur/ indikator : kekayaan rata-rata
 - Pertumbuhan ekonomi
 - Produktivitas (PNB)/tahun
 - e. Tolak ukur/indikator : pemerataan.
 - Keseimbangan kekayaan.
 - Berkelanjutan atau berjangka panjang
 - f. Tolak ukur/indikator : kerusakan lingkungan
 - Berdampak lingkungan
 - Melestarikan atau mengurus SDA
 - g. Tolak ukur/indikator : kadilan sosial dan kesinambungan
 - Menumbuhkan kreativitas/tidak
 - Produktif/tidak

- Menciptakan kesenjangan sosial
- 2) Bagaimana bentuk-bentuk protes yang dilakukan masyarakat desa Palihan dan Gelagah Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo tahun 2014.

a. Aksi gerakan protes

Aksi gerakan protes yang dilakukukan oleh masyarakat terhadap pembangunan bandara oleh PT. Angkasa Pura 1.

➤ Tolak ukur/indikator : Protes simbolik

- Dilakukan dengan cara apa
- Membuat demonstrasi/protes santun
- Tertutup atau terbuka

➤ Tolak ukur/indikator : Lembaga alternatif.

- Apa yang dilakukannya
- Yang menjadi aktor
- Isu yang diangkat
- Bentuk-bentuk advokasi

➤ Tolak ukur/indikator : Intervensi.

- Bentuk Pelaksanaannya
- Damai/anarkis atau kekerasan
- Masif/secara berkala

b. Perilaku kolektif dan situasi perilaku kolektif.

Tolak ukur/indikator : Perilaku kolektif dan situasi perilaku kolektif.

- Dorongan kesadaran/paksaan
- Merugikan/tidak

- Berkelanjutan /temporer
- c. Bentuk-bentuk protes atau perlawanan.

Bentuk-bentuk protes atau perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap pembangunan bandara oleh PT. Angkasa Pura 1. 2014.

➤ Tolak ukur/indikator : Lobbying.

- Pelaksanaan
- Hambatan-hambatan

➤ Tolak ukur/indikator : Mobilisasi.

- Kompeten/tidak dalam pelaksanaan advokasi
- Pengerahan massa
- Pengordinasian

H. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan subjek/objek penelitian seseorang dan masyarakat.¹⁵¹ Artinya, usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada usaha mengemukakan gejala-gejala secara lengkap agar jelas keadaan atau kondisinya.¹⁵² Sementara Koentjoro mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam

¹⁵¹Hadri Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University press. Juli 2012 Hal. 67

¹⁵² Ibid. Hal. 67

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.¹⁵³

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena- fenomena yang diteliti.

2. Jenis Data.

Adapun data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari narasumber/ informan. Data primer dalam penelitian ini berupa informasi dari Kepala Desa Desa Palihan dan Desa Gelagah (sebagai pihak pemerintah) dan kelompok masyarakat (kelompok tani, kelompok pemuda dan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) terkait).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini diperoleh dari dokumen ataupun informasi yang ada dimedia massa atau elektronik yang berkaitan dengan kegiatan protes. Guna, mendukung penelitian yang dilakukan penulis. Dokumen ataupun informasi pada data sekunder ini hanya buku atau informasi yang berhubungan dengan

¹⁵³Koentjoro dikutip Haris Herdiansyah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Op.cit. hlm 9.

kegiatan protes dari kelompok masyarakat yang ditergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT).

3. Teknik Pengumpulan Data.

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.¹⁵⁴ Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi.

a) Wawancara.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan pada objek penelitian.¹⁵⁵ Dalam teknik wawancara ini peneliti melakukan interviu atau mengumpulkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Prangkat yang dipakai dalam teknik ini berupa, HP (hendpone) dan kamera. Proses interviu dilakukan dilokasi penelitian (Desa Glaga dan Palihan Kecamatan Temon) dengan narasumber. Narasumber yang diwawancarai ialah, Kepala Desa Desa Palihan dan Desa Gelagah (sebagai pihak pemerintah) dan kelompok masyarakat (kelompok tani, ketua pemudadikedua desa tersebut dan Lembaga Suadaya Masyarakat (LSM) terkait).

Selanjutnya, untuk narasumber yang akan diwawancarai adalah narasumber yang punya pengetahuan tentang kegiatan protes. Dalam penelitian ini, kelompok yang dijadikan narasumber bagi peneliti adalah antara lain, sebagai berikut :

¹⁵⁴Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.hlm.308

¹⁵⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 1994, hlm. 04

1. Pemerintah (Kepala Desa).
 - a) Kepala Desa Paliahan, jumlah 1 orang.
 - b) Kepala Desa Gelagah, jumlah 1 orang.
2. Kelompok Masyarakat
 - a) Kelompok tani yang terhimpun dalam Wahana Tri Tunggal (WTT), target ketua kelompok tani desa Gelagah jumlah 1 orang, dan Desa Palihan Jumlah 1 orang.
 - b) Lembaga Suadaya Masyarakat
 - i. Ketua organisasi pemuda, Desa Palihan jumlah 1 orang dan Desa Gelagah jumlah 1 orang.
 - ii. Ketua Wahana Tri Tunggal, jumlah 1 orang)

Dalam penelitian ini penulis telah memilih beberapa orang yang dijadikan sebagai narasumber untuk mewakili pemerintah dan masyarakat yaitu: Kepala Desa selaku pemimpin desa, ketua Lembaga Suadaya Masyarakat, ketua Kelompok tani dan kepala pemuda. Hal ini dikarenakan kepala desa merupakan pemimpin desa yang mempunyai peran penting serta tanggung jawab penuh dalam pembangunan desa. Sedangkan ketua LSM sebagai penanggung jawab tertinggi terhadap lembaga sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan – peraturan organisasi / lembaga yang telah ditetapkan. Ketua Umum juga mempunyai hak Preogratif untuk mengambil langkah – langkah dalam kebijakan – kebijakan sesuai dengan GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi). Sementara ketua pemuda yang mempunyai tanggung jawab atas jalannya semua kegiatan dan memimpin serta mengendalikannya semua agenda organisasi. Dari penjelasan di atas, penulis menjadikan alasan untuk memilih pemimpin dari masing-masing organisasi baik itu dari pemerintah maupun masyarakat untuk dijadikan narasumber.

b) Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara untuk mengumpulkan data-datayang suda ada sebelumnya di lokasi penelitian. Data ini berupa surat-surat, dokumen, catatan-catatan, atau foto-foto kejadian protes yang ada dilokasi penelitian. Tujuannya, untuk memperjelas dan mendukung penelitan ini. Dokumentasi dalam penelitian ini dalah foto yang berkaitan dengan gerakan perlawanan (protes), dokumen perlawanan (protes), atau berupa catatan-catatan, penting dari masyarakat dalam melakukan kegiatan protes.

c) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung, dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.¹⁵⁶ Observasi dilakukan terhadap objek di tempat kejadian dengan mencatat secara sistematis gejala yang tampak pada objek penelitian. Objek dari pengamatan ini adalah di Desa Palihan dan Desa Gelagah, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo. Waktu yang dipakai dalam penilitian ini kurang lebih 4 bulan. Di dalam penelitian ini, penulis akan mencatat protes masyarakat terhadap pembangunan bandara oleh PT. Angkasa Pura I tahun 2014. Temon, Kabupaten Kulon Progo dengan menguraikan secara sistematis fakta-fakta yang penulis temukan berdasarkan hasil observasi secara langsung yang meliputi. Waktu, Tempat, Keterangan dan Pengamatan.

I. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian tentang Perotes Masyarakat Terhadap Pembangunan Bandara Oleh PT. Angkasa Pura 1 Tahun 2014. Menurut Koentjaraningrat analisis

¹⁵⁶Hadri Namawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University press. Juli 2012 Hal 106

data dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi), maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan tersebut berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori maka yang digunakan adalah analisa kuantitatif.¹⁵⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh dari narasumber dan diolah dengan menggunakan kualitatif. Serta, penggunaan skor dan skala seperti biasa dilakukan dalam analisis kuantitatif. Baik data primer maupun data sekunder dipilah-pilah sesuai dengan karakteristiknya dengan melihat kecenderungan yang berpautan satu sama lain dengan indikator penelitian yang ditetapkan.

J. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulisan yang dipakai adalah presentase data yang didapat. yaitu, penulisan data-data hasil penelitian berdasarkan wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi. Lalu, dibaca berulang kali sehingga penulis mengerti benar permasalahannya, kemudian dianalisis sehingga dapat gambaran mengenai penghayatan pengalaman dari subjek.

Guna memperoleh hubungan menyeluruh serta selaras dengan tujuan penelitian, maka pembahasan akan disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, BAB II GAMBARAN UMUM, BAB III PROTES MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN BANDARA OLEH PT.ANGKASA PURA 1 TAHUN 2014.

¹⁵⁷Koentjaraningrat. *Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia. Jakarta. 2007. hlm 4